

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejarah telah mencatat bagaimana pada akhir abad ke-20 sebagai penutupnya abad tersebut ditutup dengan masa kelam bagi dunia. Dua buah bom atom milik Amerika Serikat yang bersarang di dua kota penting Jepang dan meluluhlantahkannya menjadi pertanda detik-detik salah satu perang paling mengerikan telah usai. Selama perang mengerikan yang dikenal sebagai Perang Dunia ke 2 tersebut berlangsung, sejak pra-terjadinya dan pasca terjadinya perang tersebut telah banyak meninggalkan bekas duka dalam sejarah. Munculnya kekuatan baru, hancurnya kekuatan dunia, munculnya aliansi-aliansi belahan dunia, pecahnya aliansi-aliansi dunia, muncul dan rusaknya hubungan-hubungan antar negara telah menjadi dinamika pada periode perang tersebut.

Pasca perang dunia kedua, kekalahan Jepang pada perang itu dan merupakan momen merdekanya daerah-daerah di belahan dunia yang berada di bawah kekuasaan Jepang . Pada kisaran tahun 1946-1974, era itu merupakan era pembenahan bagi Jepang, mulai dari perombakan sistem pemerintahan, intervensi negara-negara adi kuasa, pembangunan ekonomi besar-besaran dan sebagainya. Pada saat itu intervensi negara adi kuasa yaitu Amerika Serikat terhadap Jepang menjadi momentum perubahan signifikan pada sistem pemerintahan Jepang. Walaupun pada awalnya Amerika mengintervensi Jepang bermaksud untuk mencegah Jepang mencapai titik kekuatan militer dan ekonomi yang

memungkinkan Jepang untuk melakukan hal yang sama saat sebelum perang dunia kedua yaitu menjadi negara super power baru dan menduduki banyak negara, akan tetapi hal tersebut tidak bisa terwujud sepenuhnya. Hal yang cukup mengagetkan dunia internasional dan bahkan Amerika di bidang ekonomi dunia adalah munculnya negara yang dengan kekuatan ekonomi baru dengan pertumbuhan yang sangat pesat dan singkat pasca kealahannya di perang dunia ke dua, yaitu Jepang negara yang paling dihindarkan dari pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara super power oleh Amerika dan ironisnya kekuatan ekonomi Jepang tersebut berasal dari kebijakan Amerika di negara tersebut. Seperti yang dipaparkan oleh Richardson pada makalahnya yang berjudul *The Political Economy of Japan*, mengatakan bahwa ekonomi Jepang merupakan salah satu cerita sukses pasca perang dunia ke 2, yaitu kesuksesan Jepang bangkit dari abu-abu kealahannya saat perang, dan pada saat ini kekuatan ekonomi Jepang menduduki peringkat kedua dunia. Kesuksesan ini berasal dari peran pemerintah Jepang dan hubungan baik yang terjalin antara pemerintah Jepang dan masyarakatnya dalam bidang pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi dan menjadi suatu kesadaran bersama (M. Richardson, 1993).

Dari tahun ke tahun Jepang dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dan cukup stabil, dan bahkan pertumbuhan ekonominya bisa meningkat hingga persentase yang cukup signifikan. Kekuatan ekonomi negara yang bertumpu pada sektor teknologi industri, impor-ekspor, dan pariwisata menjadikan Jepang sebagai salah satu negara dalam G20 atau yang di sebut-sebut sebagai salah satu dari 20 negara dengan pertumbuhan ekonomi

tertinggi di dunia. Sebut saja pada periode quarter akhir 2010 Jepang bahkan mencapai tingkat pertumbuhan nilai GDP meningkat hingga poin 5,5%, yang mana perbedaan nilai yang cukup signifikan dengan pertumbuhan ekonomi Amerika yang bahkan tidak mencapai poin 2% dalam peningkatan GDP-nya pada saat yang bersamaan. Bisa dikatakan bahwa peningkatan ekonomi Jepang yang cukup tinggi tersebut membuat negara yang dikenal sebagai negeri sakura ini memiliki potensi untuk tampil sebagai kekuatan dunia yang baru saat itu, apalagi dengan kekuatan pasar Jepang yang mana pasar teknologi Jepang telah menyebar di pasar internasional serta daya tarik wisata Jepang yang sangat menarik perhatian wisatawan manca negara untuk berkunjung dan secara tidak langsung telah menambah devisa negara yang menopang ekonomi Jepang.

Akan tetapi pada tahun 2011 tepatnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2011 pada dini hari waktu setempat gempa berkekuatan 8,9 skala richter terjadi 130 meter dari bibir pantai Prefektur Miyagi dan dari gempa tersebut disusul oleh tsunami yang menghantam Jepang dibagian pesisir pantai Pasifik yang ketinggian ombaknya mencapai 10 meter. Bencana alam tersebut cukup memukul Jepang, selain banyaknya korban jiwa yang mencapai puluhan ribu jumlahnya, sistem ekonomi dan perindustrian Jepang terhambat. Pasalnya pada saat bencana tersebut pembangkit listrik tenaga nuklir di kawasan Fukushima terpaksa dimatikan dikarenakan dua pembangkit listrik diantaranya terbakar yang menyebabkan kebocoran nuklir (yang nantinya menyebabkan wilayah Fukushima terpaksa dikosongkan akibat radiasi Nuklir). Hal tersebut menyebabkan 4 juta penduduk di kawasan Tokyo tidak mendapatkan aliran listrik, terhentinya operasi kereta cepat

Shinkansen di wilayah utara, serta ditutupnya bandara Internasional Narita (Nugraha, 2011). Dari kejadian tersebut dicatat kerugian yang diterima Jepang terhitung mencapai 2 triliun yen atau sekitar US\$ 309 miliar. Hancurnya sebagian wilayah di Jepang itu akan menggerus pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun fiskal 2011 yang mana kerugian ini telah menelan kerugian 2 kali lipat dari kerugian yang diderita Jepang pada saat gempa Kobe pada tahun 1995 dan secara tidak langsung hal ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Jepang sebesar 0,5%. Serta menurut perkiraan resmi dari kantor pemerintah Jepang, yang dikutip dari *AFP*, Rabu (23/3/2011), biaya untuk mengganti kerusakan akibat hancurnya perumahan, pabrik-pabrik dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang diperkirakan mencapai 16 triliun yen hingga 25 triliun yen untuk 3 tahun fiskal ke depan (Qomariyah, 2011).

Setelah kejadian tersebut seperti yang telah diperkirakan beberapa peneliti dan pakar ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jepang turun dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Jepang menurun hingga 1,4 %, kemudian pada quarter awal tahun 2013 menurun hingga -0,1%, quarter awal 2014 menurun hingga -0,2%, dan pada quarter ke-3 tahun 2014 mencapai puncak penurunan pertumbuhan ekonomi Jepang yang bahkan mencapai nilai -1,9% dan angka tersebut merupakan angka terendah sejak 4 tahun terakhir (TradingEconomics, Japan GDP Growth Rater, 2015). Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut tentu saja merupakan ancaman untuk Jepang dan menuntut Jepang untuk tidak tinggal diam. Dalam usaha mengembalikan stabilitas ekonomi Jepang, pemerintah Jepang telah banyak mengeluarkan kebijakan mulai dari

kebijakan subsidi pembelian kendaraan energi terbarukan, pemberdayaan investasi publik, dll. Akan tetapi dari salah satu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jepang dalam hal memperbaiki stabilitas ekonomi Jepang sekitar tahun 2011-2015, salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jepang adalah dibebaskannya visa kunjungan ke Jepang untuk 67 negara yang diresmikan pada tahun 2014-2015, jumlah ini merupakan peningkatan jumlah yang cukup signifikan bagi negara yang dibebaskan visanya oleh Jepang sejak 1 dekade terakhir.

Visa merupakan suatu dokumen resmi yang bisa didapatkan dari kedutaan besar negara penerima di masing-masing negara individu yang berkunjung yang berisi perijinan untuk memasuki suatu negara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh negara penerima, biasanya waktunya berbeda-beda tergantung tujuan dari kunjungan, mulai dari 15-30 hari atau bahkan 5 tahun. Dalam hal ini Jepang memberikan bebas visa bagi 67 negara untuk visa kunjungan sementara untuk batasan waktu rata-rata 90 hari atau kurang dengan batas waktu tersingkat 15 hari bagi negara Brunei, Indonesia, dan Thailand, serta batas waktu terpanjang yaitu 180 hari khusus untuk negara Austria, Jerman, UK, Liechtenstein, dan Irlandia. 67 negara yang diberikan pembebasan visa kunjungan oleh Jepang tersebar di beberapa wilayah dunia seperti Amerika Utara, Amerika Latin dan Caribbean, Asia, Timur Tengah, *Oceania*, Afrika, dan Eropa (Japan, 2014). Dikatakan oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dikutip dari situs resmi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia (7, Nov, 2014) bahwa terwujudnya kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pariwisata Jepang yang menargetkan 20

juta wisatawan ke Jepang, sebagai strategi pertumbuhan Jepang, dan utamanya dapat berperan besar dalam upaya mempererat hubungan Jepang-Indonesia (KedubesJepang, 2014).

Menarik jika diperhatikan, kebijakan pembebasan visa bagi 67 negara sekaligus bisa dikatakan merupakan tindakan yang cukup berani yang di ambil oleh suatu negara, atau bisa juga dikatakan suatu kebijakan pembebasan visa untuk jumlah negara yang banyak merupakan suatu sikap keterbukaan yang berani. Pasalnya walaupun visa hanya terlihat sebagai surat perijinan biasa akan tetapi sebenarnya visa merupakan suatu protokol atau salah satu upaya peningkatan keamanan dan pembatasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Dalam proses pembuatan visa terdapat dokumen-dokumen yang harus diisi atau bahkan penerapan sistem interview bagi para pengunjung jika ingin mengunjungi suatu negara dengan tujuan untuk memastikan tujuan kunjungan tersebut tidak akan membawa dampak negatif untuk negara penerima. Tidak dapat dipungkiri permasalahan melewati lintas batas negara bukan lagi menjadi hal yang dipersulit di era globalisasi ini, bahkan dalam skala individu bisa dengan mudah melakukan perjalanan lintas batas teritorial negara. Akan tetapi hal tersebut terkadang dimanfaatkan oleh beberapa kelompok kepentingan yang ingin mengacaukan stabilitas suatu negara, seperti kelompok teroris, imigran gelap, dsb. Oleh sebab itu proses visa diaplikasikan oleh beberapa negara dengan tujuan meminimalisir hal tersebut terjadi. Selain itu sistem visa akan bisa menguntungkan negara dikarenakan dalam pembuatannya visa kunjungan biasanya dikenakan biaya yang mana hal tersebut juga akan membantu ekonomi negara. Lagi pula praktik sistem

pembebasan visa yang paling terlihat dilakukan oleh negara-negara kawasan Uni Eropa untuk sesama negara di dalamnya, hal tersebut dilakukan dilandaskan oleh keterikatan negara-negara tersebut dalam suatu organisasi internasional yaitu Uni Eropa itu sendiri dan terpaut jumlah negara yg tidak banyak, walaupun demikian permasalahan pembebasan visa oleh Jepang merupakan kasus yang berbeda karena Jepang dengan 67 negara tersebut tidak memiliki keterikatan seperti yang dimiliki oleh negara-negara di dalam kawasan Uni Eropa.

Meskipun demikian, kebijakan pembebasan visa oleh Jepang tersebut mendapat perhatian dan respon positif dari beberapa kalangan. Beberapa negara telah menunjukkan ketertarikannya terhadap kebijakan tersebut, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara-negara lainnya.

B. RUMUSAN MASALAH

Apa strategi Jepang dibalik kebijakan pembebasan visa pada periode tahun 2014-2015 ?

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam menjawab permasalahan di atas, penulis akan menggunakan model rasionalitas menurut Kamus Hubungan Internasional karya Jack C Plano & Roy Olton serta konsep Economic Security oleh Barry Buzan.

1. Model Rasional

Dewasa ini dalam konteks studi hubungan internasional semakin banyak diketahui bahwa model aktor rasional sedikit banyak mempengaruhi pembuatan

kebijakan dalam level analisis rasionalitas tersebut mempengaruhi deskripsi dan penjelasan tentang pembuatan kebijakan itu sendiri. Pertanyaan yang banyak muncul dewasa ini tentang apakah pembuatan kebijakan itu rasional sudah merupakan hal yang sangat fundamental dalam pendekatan ini (Evans & Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relatiion*, 1998).

Dalam *Rational Actor Model*, Tindakan politik luar negeri dipilih oleh pemerintah/negara untuk memaksimalkan kepentingan-kepentingan nasional. Dari pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa dalam model rasionalitas efisiensi kebijakan yang diambil dalam rangka tindakan politik luar negeri sangatlah penting untuk dipertimbangkan dan negara merupakan aktor satu-satunya dalam pembuatan PLN yang memiliki pilihan-pilihan rasional, memiliki tujuan yg jelas, menentukan pilihan kebijakan berdasarkan keuntungan dan kerugian yg akan diterima (Sugito,2013). Dalam diskusi rasionalitas dewasa ini biasanya dijadikan titik awal untuk melihat kebijakan yang menjurus pada kepentingan ekonomi yang mana rasionalitas tersebut bisa didefinisikan sebagai *utility maximization*. Hal ini biasa diasumsikan sebagai istilah untuk suatu cara bagaimana suatu kebijakan dibuat dengan sangat mempertimbangkan efisiensinya. Dalam model ini salah satu teori yang muncul adalah *Game theory* yang mana teori ini mengeneralisasikan model ini berlandaskan pendekatan *utility maximazation*. Hal ini menyatakan bahwa dalam apa yang disebut sebagai “rasional” adalah membuat kebijakan yang bisa memksimalkan keuntungan yang didapat dan mengurangi kerugian hingga titik sekecil-kecilnya, dan kebijakan yang berlainan dari hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak rasional (Evans &

Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, 1998). Dalam hal ini, pemaparan data di atas terkait dengan konsep *rational actor model* ini berlaku dalam pengambilan keputusan oleh suatu aktor dalam hubungan internasional akan dikaitkan dengan kebijakan pembebasan visa yang diambil oleh Jepang. Tindakan yang diambil Jepang adalah suatu tindakan yang didasarkan oleh tingkah laku dasar suatu negara. Pada dasarnya negara akan bertindak sebagaimana suatu negara sebagai aktor internasional bertindak, terlepas dari apakah itu berdasarkan pemikiran individual, nasional, maupun lingkungannya dalam dunia internasional.

Sebagai suatu aktor dalam dunia hubungan Internasional, Jepang dalam hal ini pastinya merupakan aktor yang rasional sebagaimana negara-negara lain sebagai satu-satunya aktor dalam pembuatan PLN. Semua kebijakan yang diambil oleh Jepang pastinya berdasarkan tujuan Jepang untuk mencapai kepentingan nasionalnya sebagai suatu negara, tidak terkecuali dengan kebijakan pembebasan visa bagi 67 negara. Bisa dikatakan bahwa pengambilan kebijakan tersebut tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional Jepang yang cukup besar dan dalam jangka waktu yang panjang. Bisa diasumsikan juga dalam hal ini ketidakmungkinan kebijakan pembebasan visa kunjungan bagi 67 negara oleh Jepang diambil hanya untuk sekedar agar mempermudah wisatawan asing bisa lebih tertarik untuk berkunjung ke Jepang. Asumsi ini dapat dibenarkan jika dilihat dari perspektif pendekatan *utility maximization*. Sebelum keputusan tersebut diambil oleh Jepang, pastinya telah melewati proses pengambilan kebijakan yang panjang dan pastinya selama proses tersebut persentasi

kemungkinan kerugian dari kebijakan tersebut telah ditekan hingga titik yang sekecil-kecilnya.

Jika ingin melihat tujuan Jepang dalam pembuatan kebijakan pembebasan visa bagi 67 negara, kita bisa meninjau kembali kondisi perpolitikan dan perekonomian Jepang sebelum tahun 2014-2015 khususnya pasca krisis global 2008 dan bencana alam gempa dan tsunami di Jepang tahun 2011. Pada pembahasan diatas telah disebutkan bagaimana kejadian tersebut telah sangat memojokkan Jepang dan turut andil dalam mempengaruhi stabilitas perekonomian dan perpolitikan Jepang. Demi melepaskan diri dari keterpurukkan tersebut, sangat penting adanya saling tindakan yang di ambil oleh Jepang. Untuk hal tersebut maka yang dibutuhkan adalah diperbanyaknya kebijakan-kebijakan Jepang yang memungkinkan negara tersebut bisa menstabilkan kondisis internal negaranya. Dalam hal inilah kita bisa melihat bagaimana kebijakan pembebasan visa bagi 67 negara oleh Jepang merupakan salah satu usaha untuk mengembalikan stabilitas politik dan perekonomian Jepang di internal dan eksternal.

2. Economic Security

Konsep keamanan dalam ilmu HI dan dalam kehidupan sejak bebarapa dekade telah mengalami perubahan. Saat era dimana dunia dalam tekanan perang, konsep *security* lebih diartikan atau dihubung-hubungkan dengan kata *power* atau kekuatan. Akan tetapi sejak pasca perang konsep *security* ini menjadi konsep yang

semakin kompleks untuk diartikan. Barry Buzan dalam bukunya *People, State, and Fear* menitik beratkan bahwa konsep *security* terlalu sempit dan dia memiliki tujuan untuk membuat kerangka yang lebih besar terhadap konsep tersebut, dimana akan memunculkan konsep-konsep yang sebelumnya belum disadari sebagai bagian dari konsep *security* itu sendiri, seperti konsep keamanan ekonomi, lingkungan, atau sosial kemasyarakatan (Stone, 2009).

Dalam pemikirannya, Buzan mengklasifikasikan konsep *security* menjadi 3 level, yaitu level individual, nasional, dan Internasional. Dalam level individual menurut Buzan keamanan individual bisa diartikan sebagai jaminan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan individual seperti “hak hidup, kesehatan, status, kesejahteraan atau kekayaan, dan kebebasan” (Buzan, 1991). Akan tetapi menurut Stone dalam artikelnya *Security According to Buzan*, mengatakan bahwa konsep keamanan tidak bisa diaplikasikan dengan *cookie-cutter model* yang mana konsep keamanan untuk individual tidak bisa begitu saja disamakan dengan level keamanan untuk nasional dan seterusnya, karena pada hakikatnya masalah keamanan nasional dan internasional memiliki entitas yang lebih rumit dan lebih besar. Dalam karyanya Buzan untuk membedakan antara level individual, nasional, serta internasional dimana untuk masalah keamanan level nasional, Buzan membaginya dalam 3 aspek yaitu “*the idea of the state, the physical base of the state and the institutional expression of the state*” (Stone, 2009). Untuk level keamanan internasional Buzan memaparkan dalam analisisnya di dalam buku “*New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century*” bahwa level keamanan internasional tersebut dibagi menjadi 5 sektor yang berbeda (Politik,

Militer, Ekonomi, Sosial Masyarakat, dan Lingkungan). Sektor-sektor inilah yang pada era globalisasi ini telah sangat membantu para analis HI dalam mengklasifikasikan dan mendefinisikan konsep *security* yang pasalnya dewasa ini kerangka konsepnya semakin berkembang. Kelima sektor tersebut di atas juga sangatlah penting untuk dipahami ketika kita ingin mendalami atau mempelajari analisis dari Barry Buzan (Stone, 2009).

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada sektor keamanan ekonomi dalam level internasional untuk lebih mengetahui *Strategi Jepang Dibalik Kebijakan Pembebasan Visa Tahun 2014-2015*. Pasca era perang dunia masalah keamanan telah banyak mengalami evolusi mulai dari konsep dasarnya hingga pengaplikasiannya. Masalah keamanan dewasa ini tidak hanya mencakup keamanan nasional saja akan tetapi saat ini telah mencakup keamanan individual dan keamanan internasional. Dalam konsep keamanan internasional masalah ekonomi tidak terlepas dari cakupannya. Pada era globalisasi masalah ekonomi negara bukan lagi menjadi masalah satu negara saja akan tetapi ekonomi nasional di dunia telah lebih terhubung satu sama lainnya, mulai dari satu negara dengan negara lain hingga negara dengan MNC, atau bisa disebut lebih *inter-connected* dari pada sebelumnya (Sorensen, 2006).

Ketika berbicara tentang masalah ekonomi maka akan muncul pertanyaan tentang apakah ancaman bagi ekonomi itu sendiri. Definisi “ancaman” pada era ini juga telah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan konsep dari *security* itu sendiri, tapi pada dasarnya yang tidak berubah dalam definisi ancaman adalah suatu hal bisa disebut sebagai ancaman ketika hal tersebut

memiliki potensi mengganggu aspek-aspek dasar, hal lainnya seperti hak dasar manusia, integritas negara, dsb. Dalam masalah keamanan ekonomi Buzan berpendapat bahwa resiko-resiko yang dapat mengancam keamanan ekonomi suatu negara atau internasional adalah kondisi aktor ekonomi yang biasa-biasa saja, kompetisi yang agresif, dan ketidakpastian ekonomi.

Masalah keamanan ekonomi ini merupakan isu yang krusial terhadap suatu negara, mengingat bahwa keamanan ekonomi tidak bergantung pada faktor negara saja melainkan banyak faktor lain yang mempengaruhinya seperti yang telah disebutkan di atas, karena pada dasarnya dalam hal ini negara hanyalah salah satu aktor dalam sistem ekonomi dunia. Kelemahan dalam keamanan ekonomi suatu negara sebagai aktor ekonomi dunia memiliki potensi mengganggu sistem ekonomi negara lain, dalam hal ini kita bisa menjadikan krisis Yunani sebagai contoh dimana krisis tersebut berhasil mengguncangkan ekonomi Uni Eropa atau contoh yang lain ketika krisis 1998 dimana turunnya nilai mata uang Thailand berdampak pada negara-negara tetangganya.

Akan tetapi ancaman untuk keamanan ekonomi negara yang lemah tidak hanya bisa mengancam sistem ekonomi dunia tapi hal terburuknya adalah hal tersebut dapat membuka pintu bagi bangsa asing atau perusahaan-perusahaan asing untuk masuk lebih mudah kedalam sistem negara tersebut dan mulai mengontrol jalannya sistem pengambilan kebijakan negara yang secara langsung hal ini telah mengganggu integritas negara. Keamanan ekonomi juga bisa disebut sebagai salah satu faktor keamanan yang paling penting dari kelima sektor keamanan yang telah disebutkan Buzan. Hal tersebut dikarenakan sektor keamanan ekonomi

merupakan contoh yang jelas bagaimana satu sektor saling mempengaruhi satu sama lain, sebagai contoh jelasnya kita bisa melihat bagaimana sektor militer sangat bergantung pada sektor ekonomi terkait dengan budget yang digunakan atau batasan budget yang diberikan untuk keamanan militer atau lebih jauhnya keamanan ekonomi bisa disebut sebagai indikator kunci bagi kelima sektor keamanan menurut Buzan secara general (Stone, 2009).

Dari penjelasan konsep *economic security* diatas, akan diteliti bagaimana kebijakan pembebasan visa kunjungan bagi 67 negara oleh Jepang dikeluarkan. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah di level keamanan apakah alasan kebijakan tersebut diambil. Dari beberapa data di atas, bisa diklasifikasikan kebijakan pembebasan visa bagi 67 negara oleh Jepang tersebut dalam level keamanan Internasional khususnya pada ranah keamanan ekonomi. Hal ini bisa dikaitkan dengan data diatas yang menyebutkan bahwa kondisi perekonomian Jepang yang menjadi tidak stabil karena kerugian yang dialami pasca bencana alam tahun 2011. Dalam hal ini kasus tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah ancaman untuk sistem perekonomian Jepang itu sendiri sebagaimana kita mengetahui bahwa ketika sistem perekonomian mulai stabil akan mulai mempengaruhi sektor-sektor lain dalam negara terkait pendanaan untuk peningkatan sektor-sektor internal dalam negara. Melihat ancaman tersebut yang mana akan berpengaruh terhadap keamanan sistem ekonomi Jepang, maka dari itu salah satu usaha Jepang adalah membuat kebijakan pembebasan visa kunjungan bagi 67 negara demi tercapainya keamanan untuk ekonomi Jepang yang termasuk dalam kepentingan Ekonomi-Politik Jepang itu sendiri.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan diatas, penulis akan menggunakan *rational actor model* dan konsep *Economic security* sebagai landasan untuk menilai dan mengkolaborasikan data-data untuk mengetahui kepentingan ekonomi-politik Jepang dibalik pembebasan visa kunjungan pada tahun akhir tahun 2014.

D. HIPOTESA

Strategi Jepang dibalik kebijakan pembebasan visa pada periode tahun 2014-2015 adalah untuk mencapai :

1. Peningkatan sektor pariwisata Jepang untuk mengimbangi kompetisi sektor pariwisata di kawasan Asia Timur.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan usaha menstabilkan ekonomi Jepang pasca krisis global tahun 2008 dan tragedi gempa-tsunami tahun 2011 di Jepang.

E. SKOPE PENELITIAN

1. TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah tipe deskriptif, yaitu menggambarkan, mencatat, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa yang terkait dengan permasalahan dengan menguraikan. Sehingga, penelitian ini kemudian diharapkan

bisa memberikan penggambaran mengenai *Strategi Jepang Dibalik Kebijakan Pembebasan Visa Tahun 2014-2015*. Apa saja keuntungan dari kebijakan Jepang mengambil alternatif tersebut.

2. JENIS DATA DAN SUMBER DATA

Jenis data yang akan dilakukan dalam metode penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data dalam penelitian ini akan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian dari website-website resmi yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri Jepang terkait pengambilan kebijakan untuk membebaskan visa 67 negara pada tahun 2014-2015. Sedangkan data sekunder yaitu didapat dari literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan permasalahan kebijakan luar negeri Jepang terkait pembebasan visa pada tahun 2014-2015.

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber cetak dan elektronik.

4. ANALISIS DATA

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penulis akan menyimpulkan dan memberikan jawaban atas fenomena di lapangan dari data-data yang diperoleh ke dalam bentuk yang lebih sederhana.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Kerangka Pemikiran
- D. Hipotesa
- E. Skope Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II. DINAMIKA POLITIK DAN PEREKONOMIAN JEPANG PASCA PERANG DUNIA II

- A. Perpolitikan Jepang Pasca PD II
- B. Dinamika Perekonomian Jepang

BAB III. PERKEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA KAWASAN ASIA TIMUR DAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN VISA JEPANG 2014-2015

- A. Perkembangan Sektor Pariwisata di Kawasan Asia Timur
- B. Kebijakan Pembebasan Visa Jepang 2014-2015

BAB IV. STRATEGI VISA KUNJUNGAN JEPANG TAHUN 2014-2015

- A. Strategi Jepang Dalam Mengimbangi Kompetisi Industri Pariwisata di Asia Timur

B. Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Menstabilkan
Perekonomian Jepang Pasca Krisis Global 2008 dan Bencana Alam 2011

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan